



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tahun 2024 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Renja Tahun 2024 disusun sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Pagu Indikatif dan sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Renja Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun. Disamping menyajikan data perencanaan Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 juga menyajikan kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja SKPD tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan dalam mendukung program Pemerintah Daerah.

Kuala Tungkal, Oktober 2023



Kepala BKAD
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

JETER SIMAMORA, S.IP

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640420 198603 1 006

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	12
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	25
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	33
3.3. Program dan Kegiatan	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	43
BAB V PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Renja merupakan pelaksanaan dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan dalam hal sebagai berikut :

1. Renja merupakan dokumen dasar penyusunan program kegiatan OPD/SKPD kedalam KUA dan PPAS serta penyusunan dan perencanaan program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
2. Renja SKPD juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat pentingnya arti dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah antara lain :

1. Perangkat Daerah menyusun Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah paling lambat disampaikan kepada Kepala BAPPEDA paling lambat 1 (satu) minggu setelah perkada RKPD ditetapkan.
2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan

- Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
 9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah .
 10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja-SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 , antara lain :

1. Memberikan informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan tahunan.
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.
3. Sebagai bahan masukan/landasan dalam menyusun kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 .

Sedangkan, tujuannya adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD/OPD dengan Renja K/L dan Renja Pro/Kab/Kota dari tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum.

Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan.

Pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta sistem garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan tahun berjalan (tahun n-1).

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.

Kajian terhadap capaian pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi.

2.4. Review Terhadap RKPD.

Proses membandingkan antara RKPD dengan hasil analisa kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan mursrebang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumus isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan.

Penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKAD

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. selain mempunyai tugas dan fungsi koordinator dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah juga adalah salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa BKAD selaku SKPKD (dalam hal ini BKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Memperhatikan ketentuan tersebut, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintahan secara tidak langsung juga mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan representasi agenda utama pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana tentang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 yang tertuang dalam visi Bupati Tanjung Jabung Barat yaitu “MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH” dengan misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM yang beriman, berilmu dan berakhlak.
2. Mewujudkan Kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis.
3. Peningkatan tata kelola Pemerintah yang Baik untuk pelayanan publik.

4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah dan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
5. Pemerataan Pembangunan Daerah dari desa sampai ke kota.

Dan INDIKATOR Program Pembangunan RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2024 sebagai berikut:

1. Indeks Pengembangan Masyarakat (IPM)	(68, 83)
2. Angka Harapan Lama Sekolah	(13,23)
3. Rata – rata lama sekolah	(8,03)
4. Usia harapan hidup	(68,40)
5. Pengeluaran perkapita ribu rupiah/orang/tahun	(9.648.000)
6. Status kabupaten layak anak (KLA)	(Nidya)
7. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(89,00)
8. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	(70,00)
9. Persentase pemuda berprestasi atau mandiri yang dibina	(49%)
10. Indeks pembangunan keluarga	(64,56)
11. Nilai persepsi rasa aman	(70,50)
12. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	(85%)
13. Indeks pembangunan kebudayaan	(70%)
14. Indeks Reformasi Birokrasi	(55,00)
15. Nilai SAKIP Kabupaten	(66,01)
16. Maturitas SPIP	(Level 3)
17. Nilai survey kepuasan masyarakat	(80,72)
18. NILAI OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN	(WTP)
19. Laju pertumbuhan ekonomi	(3,00%)
20. PDRB perkapita (juta/orang)	(125,42)
21. Indeks kualitas lingkungan hidup	(68,80)
22. Indeks Williamson	(0,450)
23. Indeks infrastruktur	(69,41)
24. Indeks konektivitas	(0,456)

Dari uraian tersebut Evaluasi Perencanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN 2023
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NAMA OPD : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KODE	URUSAN/BID. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2021-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN		KETERANGAN
					TARGET RENJA TAHUN 2022	REALISASI RENJA 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3		5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	600%	100%	100%	100%	100,00	100%	300%	50%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen Renstra / Renja / Dpa / Evaluasi Renstra, Renja / Lakip yang disusun dan dilaporkan	600%	100%	100%	100%	100,00	100%	300%	50%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	5 Dokumen	15 Dokumen	50%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	100,00	8 Laporan	20 Laporan	42%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen Laporan keuangan tahunan OPD	600%	100%	100%	100%	100,00	100%	300%	50%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima =Gaji dan Tunjangan ASN	246 orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	100,00	41 Orang	123 Orang	50%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	24 Orang	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	24 Dokumen	33%	
	Pelaksanaan Pentausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Bulan	12 Dokumen	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	20%	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	-	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	17%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin Aparatur	600%	100%	100%	100%	-	100%	300%	50%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	625 Paket	80 Orang	80 Paket	80 Paket	100,00	90 Paket	265 Paket	42%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan adm umum OPD meliputi 7 sub kegiatan (bernilai	600%	100%	100%	100%	-	100%	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	100,00	2 Paket	2 Paket	33%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	12 Bulan	4 Paket	4 Paket	100,00	4 Paket	8 Paket	33%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	12 Bulan	3 Paket	3 Paket	100,00	2 Paket	6 Pakte	33%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	33%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	29 Media	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	24 DOkumen	33%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumla Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan	12 Bulan	60 Laporan	60 Laporan	100,00	365 Laporan	485 Laporan	159%	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	72 Dokumen	12 Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	24 Dokumen	33%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan OPD	600%		100%	82%	-	100%	-	0%	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	19 unit	-	7 Unit	4 Unit	100,00	4 Unit	8 Unit	42%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 unit	1 Kegiatan	10 unit	10 Unit	100,00	29 Unit	40 Unit	80%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	600%	100%	100%	100%	100	100%	-	0%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	20 Laporan	32 Laporan	44%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100,00	48 Laporan	60 Laporan	83%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	4 Laporan	28 Laporan	39%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600%	100%	100%	100%	100,00	100%	-	0%	

1	2	3		5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	131 Unit	12 Bulan	23 Unit	23 Unit	100,00	24 Unit	46 Unit	35%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	450 Unit	12 Bulan	90 Unit	64 Unit	100,00	94 Unit	150 Unit	33%	
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	1 Unit	-	100,00	1 Unit	1 Unit	100%	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku	600%	100%	100%	100%	-	100%	-	0%	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	600%	100%	100%	100%	-	100%	-	0%	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	6 Dokumen	50%	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	6 Dokumen	50%	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	6 Dokumen	50%	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	6 Dokumen	50%	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dokumen	44 SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	4 Dokumen	33%	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	600%	100%	100%	100%	-	100%	-	0%	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	264 Dokumen	578 Buku	44 Dokumen	44 Dokumen	100,00	44 Dokumen	88 Dokumen	33%	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	264 Dokumen	44 SKPD	44 Dokumen	44 Dokumen	100,00	44 Dokumen	88 Dokumen	33%	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	264 Dokumen	44 SKPD	44 Dokumen	44 Dokumen	100,00	44 Dokumen	88 Dokumen	33%	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	220 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	-	8 Dokumen	4%	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga	220 Dokumen	-	44 Dokumen	-	-	44 Dokumen	44 Dokumen	20%	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	220 Dokumen	-	44 Laporan	-	-	44 Laporan	44 Laporan	20%	
	Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	264 Dokumen	44 SKPD	44 Dokumen	44 Dokumen	100,00	44 Dokumen	88 Dokumen	33%	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	264 Dokumen	44 SKPD	44 Dokumen	-	100,00	44 Dokumen	44 Dokumen	17%	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	20 Dokumen	-	4 Dokumen	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	20%	
	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	220 Orang	-	44 Orang	-	-	44 Orang	44 Orang	20%	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	600%	100%	100%	100%	-	100%	-	0%	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	144 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	100,00	24 Dokumen	72 Dokumen	50%	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	24 Laporan	4 Dokumen	4 Laporan	4 Dokumen	100,00	4 Laporan	8 Laporan	33%	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	50%	
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	50%	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	0%	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	220 Orang	-	44 Orang	-	-	44 Orang	44 Orang	20%	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	600%	100%	100%	100%	-	100%	-	112%	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	25 Laporan	114 Desa	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	8 Laporan	32%	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya pengelolaan anggaran belanja tidak terduga	10 Laporan	1 Tahun	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	4 Laporan	40%	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil	20 Laporan	114 Desa	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	8 Laporan	40%	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD	600	100%	100%	100%	-	100%	-	0%	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah - Cakupan Pemenuhan Kartu Inventaris	600%	100%	100%	100%	-	100%	-	0%	
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	50%	

1	2	3		5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	-	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	20%	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya kebijakan pengelolaan barang milik daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	100,00	-	10 Dokumen	100%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	264 Laporan	44 Laporan	44 dokumen	44 Laporan	100,00	44 Laporan	132 Laporan	50%	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	5 laporan	-	1 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	20%	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 Dokumen	-	10 dokumen	10 Dokumen	100,00	10 dokumen	20 Dokumen	40%	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik	5 Dokumen	-	1 laporan	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	- 2 Dokumen	40%	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pnceawasan dan pengendalian barang milik daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-	-	6 Dokumen	100%	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	36 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00	6 Dokumen	18 Dokumen	50%	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	220 Dokumen	12 Bulan	44 Dokumen	44 Dokumen	100,00	44 Dokumen	88 Dokumen	40%	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	10 Dokumen	-	2 Laporan	-	0,00	2 Laporan	2 Laporan	20%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Perbup Nomor 28 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah dibidang Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan Pengelolaan Aset daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset daerah;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset BMD Daerah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
1. Menyusun APBD yang merupakan perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Menyusun alokasi belanja daerah dengan setepat-tepatnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah tahun 2021-2026 dan Peraturan Daerah tentang APBD, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
 3. Ikut serta menyusun kebijakan alokasi dana transfer kepada desa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 4. Membina, mengelola dan menatausahakan barang milik kekayaan daerah (Pengelolaan Aset daerah) dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna Pengelolaan Aset daerah serta pengamanannya.
 5. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.
 6. Ikut serta memajukan pertumbuhan dunia usaha.

Tugas Pokok dan Fungsi tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2018.

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh unit organisasi Badan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Pengelolaan Aset daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan asset daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan Rencana Strategis, rencana kerja, rencana Program dan Anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi : perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- e. Pengelolaan Barang milik Daerah/kekayaan Negara, dan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat, membawahi :

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2. Sub Bagian Keuangan; dan
- 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

B. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang Perencanaan Anggaran Daerah meliputi : Anggaran I, Anggaran II, Anggaran III.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- b. Pengoordinasian penyusunan RKA/DPA SKPD dan/atau RKAP/DPPA SKPD;
- c. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- d. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD;
- e. Pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- f. Pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
- g. Pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
- h. Penyediaan anggaran kas;
- i. Pengoordinasian penyusunan analisis standar biaya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran, membawahi :

1. Sub Bidang Anggaran I;
2. Sub Bidang Anggaran II;
3. Sub Bidang Anggaran III;

C. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang perbendaharaan Daerah meliputi : Pengendalian Kas Daerah, Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pengelolaan kas daerah;
- b. Pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
- c. Pengoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
- d. Pengoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- e. Pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar sp2d;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen spp dan spm, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan spj gaji dan non gaji, serta penerbitan skpp;
- g. Pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran perhitungan fihak ketiga (pfk);
- h. Pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- i. Pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas sp2d dengan instansi terkait;

- j. Pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (spj);
- k. Pengoordinasian pelaksanaan penerbitan spd restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan, membawahi :

- 1. Sub Bidang Pengendalian Kas Daerah;
- 2. Sub Bidang Belanja Langsung;
- 3. Sub Bidang Belanja Tidak langsung;

D. Bidang pengelolaan barang milik daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi : Perencanaan dan Penatausahaan Pengelolaan Aset, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan Pengelolaan Aset serta pemindahtanganan, Penilaian dan Penghapusan Pengelolaan Aset.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. Pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
- d. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;

- g. Pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- h. Pengoordinasian hasil penilaian barang milik daerah;
- i. Pelaksanaan penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- k. Pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari skpd;
- l. Pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan BMD, membawahi :

- 1. Sub Bidang Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan;
- 2. Sub Bidang Pengamanan dan penghapusan;
- 3. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan;

E. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah meliputi : Akuntansi Penerimaan, Akuntansi Pengeluaran, dan Pelaporan Keuangan Daerah dan System Informasi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- b. Pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- c. Pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- e. Pengoordinasian kegiatan penyusunan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- f. Pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- g. Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- h. Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- j. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- k. Pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- l. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- m. Pengoordinasian perencanaan, pengelolaan, pemantauan, pemeliharaan sistem informasi dan dokumentasi keuangan daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, membawahi

1. Subbidang Akuntansi Penerimaan;
2. Subbidang Akuntansi Pengeluaran;
3. Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi.

Dalam pelaksanaan pelayanan kinerja BKAD dalam pencapaian target kinerja tersebut dipengaruhi faktor internal dan eksternal yang mana dalam penganalisaan kondisi tersebut dilakukan analisa yang diantaranya analisis SWOT, Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal serta perpaduan diantara dua kondisi tersebut, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor Internal :

1. Kekuatan/potensi(*Strength*)

- 1) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 2) Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3) Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 4) Personil berasal dari unit yang membidangi urusan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

- 5) Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kelemahan(*Weaknes*)

- 1) Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen, serta prasarana penunjang kerja berupa gedung dan ruangan dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari dan pemberian layanan secara optimal kepada pihak yang berkepentingan.
- 2) Belum terpenuhinya bezetting formasi apabila dibandingkan dengan beban kerja yang ada, sehingga terjadi perangkapan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik melalui sistem online dan transparan.
- 4) Belum optimalnya kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
- 5) Masih rendahnya minat, motivasi dan pemahaman personil terhadap peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset.
- 6) Belum Optimanya transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada e-government dan e-budgeting.

Faktor Eksternal

1. Kesempatan/Peluang (*Oportunity*)

- 1) Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 2) Adanya lembaga pemerintahan dan swasta yang mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi serta kompetensi personil.
- 3) Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik
- 4) Adanya kesamaan tekad, pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh SKPD dalam rangka kepatuhan terhadap perundang-undangan di bidang keuangan dan aset daerah.
- 5) Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.

2. Tantangan/Ancaman(*Treath*)

- 1) Peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset daerah cenderung berubah-ubah dalam waktu cepat.

- 2) Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good corporate governance.
- 3) Masih rendahnya kemampuan aparat pengelola keuangan dan aset daerah SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menurut ketentuan yang berlaku. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah semakin ketat dan meningkat intensitasnya.
Dari uraian kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut diatas dapat dijabarkan tabel analisa pelayanan kinerja BKAD pada tabel 2.2 sebagaimana berikut:

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen Renstra / Renja / Dpa / Evaluasi Renstra, Renja /	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	8 Laporan	4 Laporan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen Laporan keuangan tahunan OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima =Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Orang	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	24 Orang	12 Dokumen	24 Orang	12 Dokumen
		Pelaksanaan Pentasahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	-	12 Bulan	-
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	80 Orang	105 Paket	105 Paket	110 Paket	110 Paket	115 Paket	80 Orang	80 Paket	80 Orang	80 Paket
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	-	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	-	-	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan adm umum OPD meliputi 7 sub kegiatan (bernilai 100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	1 Paket	12 Bulan	1 Paket
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Bulan	4 Paket	12 Bulan	4 Paket
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	12 Bulan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	12 Bulan	3 Paket	12 Bulan	3 Paket
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	1 Paket	12 Bulan	1 Paket
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	29 Media	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	29 Media	12 Dokumen	29 Media	12 Dokumen
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	65 Laporan	12 Bulan	60 Laporan	12 Bulan	60 Laporan
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	12 Dokumen	12 Bulan	12 Dokumen

No	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tingkat Pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan OPD		100%	100%	100%	100%	100%		82%		82%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	-	7 Unit	1 Unit	1 unit	-	-	-	4 Unit	-	4 Unit
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Kegiatan	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	1 Kegiatan	10 Unit	1 Kegiatan	10 Unit
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	1 Bangunan	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	20 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Bulan	23 Kendaraan Dinas	23 Kendaraan Dinas	25 Kendaraan dinas	30 Kendaraan dinas	30 Kendaraan dinas	12 Bulan	23 Unit	12 Bulan	23 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	90 Unit	90 Unit	90 Unit	90 Unit	90 Unit	12 Bulan	64 Unit	12 Bulan	64 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan	44 SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	44 SKPD	2 Dokumen	44 SKPD	2 Dokumen

No	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	578 Buku	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	578 Buku	44 Dokumen	578 Buku	44 Dokumen
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	-	-	44 SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	44 SKPD	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 SKPD	44 Dokumen	44 SKPD	44 Dokumen
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	44 SKPD	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 SKPD	44 Dokumen	44 SKPD	44 Dokumen
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran perhitungan pihak ketiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	-	-	-	-
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran	-	44 Laporan	44 Laporan	44 Laporan	44 Laporan	44 Laporan	44 Laporan	-	-	-	-
	Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah	44 SKPD	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 SKPD	44 Dokumen	44 SKPD	44 Dokumen
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	44 SKPD	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	-	44 SKPD	-	44 SKPD	-
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan	-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	-
	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	-	44 Orang	44 Orang	44 Orang	44 Orang	44 Orang	44 Orang	-	-	-	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Dokumen	4 Laporan	4 Dokumen	4 Laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	-	44 Orang	44 Orang	44 Orang	44 Orang	44 Orang	44 Orang	-	-	-	-

No	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	114 Desa	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	114 Desa	4 Laporan	114 Desa	4 Laporan
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Tahun	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Tahun	2 Laporan	1 Tahun	2 Laporan
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	114 Desa	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	114 Desa	4 Laporan	114 Desa	4 Laporan
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Penyusunan Standar Harga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	-	-	-	-	-	-	10 Dokumen	-	10 Dokumen	-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah		44 Laporan	44 Laporan	44 Laporan	44 Laporan	44 Laporan	44 Laporan		44 Laporan		44 Laporan
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-
		Pengamanan Barang Milik Daerah	-	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	-	10 dokumen	-	10 dokumen
		Penilaian Barang Milik Daerah	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	6 Dokumen	-	-	-	-	-	-	6 Dokumen	-	6 Dokumen	-
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Bulan	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	12 Bulan	44 Dokumen	12 Bulan	44 Dokumen
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian yang signifikan bagi SKPD dimana dengan beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

Telaahan terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kemudian dilakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal menjadi dasar dalam merumuskan kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis, yaitu keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis yang harus diperhatikan berdasarkan tupoksi BKAD adalah :

- a. Aplikasi SIPD yang belum maksimal dan keterbatasan kemampuan sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan pagu OPD
- b. Sering terjadi perubahan regulasi kebijakan dan perundang-undangan dari pusat
- c. Terdapat aset milik Pemerintah Daerah berupa tanah jalan (fasilitas umum) yang belum memiliki legalitas hukum (Sertifikat)
- d. Optimalisasi pemanfaatan aset dalam meningkatkan pendapatan daerah

2.4. Review terhadap RKPD

Hasil analisa kebutuhan dalam review terhadap RKPD Tahun 2024 dapat disajikan dalam Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rancangan Renja BKAD terhadap RKPDP tahun 2024
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	RKPDP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BKAD			11.785.642.661	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BKAD			15.878.050.695	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKAD	Tingkat pemenuhan dokumen Renstra / Renja / Dpa / Evaluasi Renstra, Renja / Lakip yang disusun dan dilaporkan		119.574.750	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKAD	Tingkat pemenuhan dokumen Renstra / Renja / Dpa / Evaluasi Renstra, Renja / Lakip yang disusun dan dilaporkan		132.199.750	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	47.375.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	60.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	72.199.750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	72.199.750	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKAD	Tingkat pemenuhan dokumen Laporan keuangan tahunan OPD		7.915.272.632	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKAD	Tingkat pemenuhan dokumen Laporan keuangan tahunan OPD		8.407.654.445	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKAD	Jumlah Orang yang Menerima =Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang	7.076.718.519	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKAD	Jumlah Orang yang Menerima =Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang	7.430.554.445	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	716.454.113	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	855.000.000	
	Pelaksanaan Pentasahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	36.000.000	Pelaksanaan Pentasahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	36.000.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BKAD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	86.100.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BKAD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	86.100.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKAD	Meningkatnya Disiplin Aparatur		119.750.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKAD	Meningkatnya Disiplin Aparatur		200.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKAD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	105 Paket	69.750.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKAD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	90 Paket	150.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKAD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKAD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKAD	Cakupan layanan adm umum OPD meliputi 7 sub kegiatan (bernilai 100%)		1.627.698.431	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKAD	Cakupan layanan adm umum OPD meliputi 7 sub kegiatan (bernilai 100%)		2.034.196.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	67.996.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	70.996.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	227.108.949	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	280.000.000	

NO	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKAD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	63.800.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKAD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	180.000.000	

NO	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	12
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKAD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	42.792.982	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKAD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	66.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKAD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	28.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKAD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	40.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	1.100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	365 Dokumen	1.300.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	97.200.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	97.200.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKAD	Tingkat Pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan OPD		537.426.848	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKAD	Tingkat Pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan OPD		900.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKAD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	410.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKAD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	127.426.848	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	800.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		1.090.660.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		1.594.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.660.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	295.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	760.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	792.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	828.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		375.260.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.610.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKAD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	246.260.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKAD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	460.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 unit	60.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99 Unit	350.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	69.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.800.000.000	

RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BKAD	Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku		225.603.011.335	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BKAD	Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku		246.104.803.965	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BKAD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah		1.788.273.182	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BKAD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah		1.875.971.877	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	249.792.635	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	262.282.266	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BKAD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	249.275.197	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BKAD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	261.738.956	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	859.614.837	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	902.595.578	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	262.960.725	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	274.393.800	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	166.629.788	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	174.961.277	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BKAD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah		622.657.215	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BKAD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah		877.649.444	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	44 Dokumen	163.572.413	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	44 Dokumen	252.691.230	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	44 Dokumen	31.429.519	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	44 Dokumen	116.027.134	

NO	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	12
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	44 Dokumen	35.166.043	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	44 Dokumen	32.736.000	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	103.318.031	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	113.392.125	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran perhitungan pihak ketiga	BKAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi	44 Laporan	31.429.519	Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran perhitungan pihak ketiga	BKAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan	44 Dokumen	71.289.422	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	44 Dokumen	46.856.000	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	44 Laporan	30.434.963	
	Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	44 Dokumen	65.173.998	Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	44 Dokumen	138.600.000	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	44 Dokumen	48.360.942	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	44 Dokumen	57.111.970	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	BKAD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	4 Dokumen	48.179.250	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	BKAD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	4 Dokumen	32.097.400	
	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	44 orang	49.171.500	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	33.269.200	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BKAD	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah		960.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BKAD	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah		1.272.130.405	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	24 Dokumen	200.000.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	24 Dokumen	215.105.880	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Laporan	175.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Laporan	248.622.570	

NO	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	12
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	225.000.000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	401.201.955	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	130.000.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	130.000.000	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	88 Orang	230.000.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	88 Orang	277.200.000	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		222.232.080.938	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		242.079.052.239	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKAD	Jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	4 Laporan	212.029.282.601	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKAD	Jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	4 Laporan	222.630.746.731	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BKAD	Terlaksananya pengelolaan anggaran belanja tidak terduga	2 Laporan	5.966.315.901	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BKAD	Terlaksananya pengelolaan anggaran belanja tidak terduga	2 Laporan	15.000.000.000	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BKAD	Terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil	4 Laporan	4.236.482.436	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BKAD	Terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil	4 Laporan	4.448.305.508	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BKAD	Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD		1.602.950.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BKAD	Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD		2.193.500.000	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	-Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah - Cakupan Pemenuhan Kartu Inventaris		1.602.950.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	-Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah - Cakupan Pemenuhan Kartu Inventaris		2.193.500.000	
	Penyusunan Standar Harga	BKAD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	106.500.000	Penyusunan Standar Harga	BKAD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	111.900.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	57.750.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	60.700.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	44 Laporan	176.700.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	44 Laporan	180.300.000	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	77.200.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	81.100.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 dokumen	437.400.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 dokumen	995.600.000	
	Penilaian Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Dokumen	85.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Dokumen	89.300.000	

RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	12
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6 Dokumen	468.500.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6 Dokumen	473.200.000	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	44 Dokumen	116.700.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	44 Dokumen	120.300.000	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	77.200.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	81.100.000	
					238.991.603.996					264.176.354.660	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 28 tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2024 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan dari usulan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.

Program rutinitas yang ada pada BKAD kab. Tanjung Jabung Barat berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam RPJMD tahun 2020-2024 dengan tema “INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL DAN BERKESINAMBUNGAN” melalui “PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI BERBAGAI BIDANG DENGAN MENEKANKAN TERBANGUNNYA STRUKTUR PEREKONOMIAN YANG KOKOH BERLANDASKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF DI BERBAGAI WILAYAH YANG DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING”. dengan 7 agenda pembangunan yang diantaranya yaitu pada point ke 3 yaitu “MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING”. Yang diselaraskan dengan misi ketiga RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu, “PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK UNTUK PELAYANAN PUBLIK”. Dengan tujuan “TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL”. Dengan salah satu sasarnya “MENINGKATKAN KINERJA PENGANGGARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH” dengan indikator “NILAI OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DENGAN PREDIKAT WTP”.

2.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dapat memberikan pelayanan yang terbaik terutama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah demi untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Meningkatnya kinerja perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun tujuan, sasaran, indicator dan target OPD selama 5 Tahun ditunjukkan pada tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2024	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kinerja perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	- Ketepatan waktu penetapan APBD - ketersediaan kas/dana yang tepat waktu - persentase hasil	Tepat waktu 100%	Tepat waktu 100%	Tepat waktu 100%	Tepat waktu 100%	Tepat waktu 100%	Tepat waktu 100%

		sinkronisasi laporan keuangan OPD terhadap LKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Meningkatkan kinerja pengelolaan aset daerah	- Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	- Nilai AKIP OPD	64,39(B)	65(B)	66(B)	67(B)	68(B)	69(B)
		- Indeks kepuasan masyarakat	82,39(B)	83(B)	84(B)	85(B)	86(B)	87(B)

2.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program disusun dengan memperhatikan Sub Bidang pada undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan perundangan – undangan.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan perundang undangan.

SKPD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (dalam hal ini BKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun APBD/Perubahan APBD, Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi :

A. Program

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3. PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH

B. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
9. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
10. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
11. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Pengelolaan Barang Milik Daerah

C. Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Pelaksanaan Pentausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
16. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
17. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
23. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
24. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
25. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
26. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
27. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
28. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
29. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
30. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
31. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
32. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
33. Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga
34. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
35. Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank
36. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
37. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan
38. Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
39. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
40. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

41. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
42. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
43. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
44. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
45. Penyusunan Standar Harga
46. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
47. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
48. Penatausahaan Barang Milik Daerah
49. Inventarisasi Barang Milik Daerah
50. Pengamanan Barang Milik Daerah
51. Penilaian Barang Milik Daerah
52. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
53. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
54. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
55. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2024, dapat diuraikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

TABEL 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode Rek	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi/Unit Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	BKAD		16.207.904.785	APBD		16.380.550.695
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen Renstra / Renja / Dpa / Evaluasi Renstra, Renja / Lakin yang disusun dan dilaporkan	BKAD		132.199.750			132.199.750
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKAD	5 Dokumen	60.000.000	APBD	5 Dokumen	60.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKAD	8 Laporan	72.199.750	APBD	8 Laporan	72.199.750
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen Laporan keuangan tahunan OPD	BKAD		8.048.818.519	APBD		8.407.654.445
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima =Gaji dan Tunjangan ASN	BKAD	41 Orang	7.076.718.519	APBD	41 Orang	7.430.554.445
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKAD	12 Dokumen	850.000.000	APBD	12 Dokumen	855.000.000
	Pelaksanaan Pentausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKAD	12 Dokumen	36.000.000	APBD	12 Dokumen	36.000.000
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	BKAD	2 Dokumen	86.100.000	APBD	2 Dokumen	86.100.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				986.690.016			502.500.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKAD	2 Dokumen	38.550.000	APBD	2 Dokumen	60.700.000

Kode Rek	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi/Unit Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BKAD	10 dokumen	948.140.016	APBD	10 dokumen	441.800.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin Aparatur	BKAD		200.000.000	APBD		200.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BKAD	90 Paket	150.000.000	APBD	110 Paket	150.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BKAD	5 Orang	50.000.000	APBD	5 Orang	50.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan adm umum OPD meliputi 7 sub kegiatan (bernilai 100%)	BKAD		1.913.196.500	APBD		2.034.196.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BKAD	2 Paket	67.996.500	APBD	1 Paket	70.996.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKAD	4 Paket	270.000.000	APBD	4 Paket	280.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	BKAD	2 Paket	175.000.000	APBD	3 Paket	180.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BKAD	1 Paket	63.000.000	APBD	1 Paket	66.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BKAD	12 Dokumen	40.000.000	APBD	12 Dokumen	40.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKAD	365 Laporan	1.200.000.000	APBD	60 Laporan	1.300.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKAD	12 Dokumen	97.200.000	APBD	12 Dokumen	97.200.000

Kode Rek	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi/Unit Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan OPD	BKAD		900.000.000	APBD		900.000.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BKAD	1 Unit	100.000.000	APBD	3 Unit	100.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BKAD	1 Unit	800.000.000	APBD	10 Unit	800.000.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BKAD	1 Unit	-	APBD	1 Bangunan	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	BKAD		1.537.000.000	APBD		1.594.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKAD	20 Laporan	5.000.000	APBD	12 Laporan	6.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	BKAD	48 Laporan	740.000.000	APBD	12 Laporan	760.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKAD	4 Laporan	792.000.000	APBD	12 Laporan	828.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD		2.490.000.000	APBD		2.610.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BKAD	24 Unit	440.000.000	APBD	25 Kendaraan dinas	460.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BKAD	99 Unit	350.000.000	APBD	90 Unit	350.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKAD	1 Unit	1.700.000.000	APBD	1 Unit	1.800.000.000

Kode Rek	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi/Unit Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku	BKAD		199.983.887.100	APBD		236.687.909.383
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	BKAD		1.787.836.200	APBD		1.884.833.746
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	BKAD	2 Dokumen	246.557.600	APBD	2 Dokumen	262.282.266
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	BKAD	2 Dokumen	274.960.000	APBD	2 Dokumen	261.738.956
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	BKAD	2 Dokumen	841.654.000	APBD	2 Dokumen	902.595.578
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	BKAD	2 Dokumen	256.064.600	APBD	2 Dokumen	274.393.800
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan	BKAD	2 Dokumen	168.600.000	APBD	2 Dokumen	183.823.146
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	BKAD		536.216.000	APBD		469.371.702
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BKAD	44 Dokumen	220.650.000	APBD	44 Dokumen	171.751.033
	Penyiapan. Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BKAD	44 Dokumen	106.310.000	APBD	44 Dokumen	33.000.995
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BKAD	44 Dokumen	27.120.000	APBD	44 Dokumen	36.924.345
	Koordinasi. Fasilitasi. Asistensi. Sinkronisasi. Supervisi. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana	BKAD	4 Dokumen	74.076.000	APBD	4 Dokumen	108.483.933
	Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah. laporan aliran kas. dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BKAD	44 Dokumen	-	APBD	44 Dokumen	-

Kode Rek	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi/Unit Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas. Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan	BKAD	44 Laporan	-	APBD	44 Laporan	-
	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BKAD	44 Dokumen	52.800.000	APBD	44 Dokumen	68.432.698
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BKAD	44 Dokumen	55.260.000	APBD	44 Dokumen	50.778.698
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BKAD	4 Dokumen	-	APBD	4 Dokumen	-
	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	44 Orang	-	APBD	44 Orang	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	BKAD		680.492.000	APBD		990.000.000
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset. Kewajiban. Ekuitas. Pendapatan. Belanja. Pembiayaan. Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	BKAD	24 Dokumen	155.856.000	APBD	24 Dokumen	200.000.000
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	BKAD	4 Laporan	201.028.000	APBD	4 Laporan	200.000.000
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKAD	1 Dokumen	62.730.000	APBD	1 Dokumen	230.000.000

Kode Rek	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi/Unit Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD	1 Dokumen	129.248.000	APBD	1 Dokumen	130.000.000
	Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	BKAD	88 Orang	131.630.000	APBD	88 Orang	230.000.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD		196.979.342.900	APBD		233.343.703.935
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	BKAD	4 Laporan	188.747.812.900	APBD	4 Laporan	222.630.746.731
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya pengelolaan anggaran belanja tidak terduga	BKAD	2 Laporan	5.000.000.000	APBD	2 Laporan	6.264.651.696
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil	BKAD	4 Laporan	3.231.530.000	APBD	4 Laporan	4.448.305.508
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD	BKAD		1.155.755.000	APBD		1.056.100.000
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah	BKAD		1.155.755.000	APBD		1.056.100.000
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	BKAD	1 Dokumen	186.000.000	APBD	1 Dokumen	111.900.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKAD	44 Laporan	404.320.000	APBD	44 Laporan	180.300.000
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	BKAD	1 Laporan	-	APBD	1 Laporan	-
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian	BKAD	1 Dokumen	21.400.000	APBD	1 Dokumen	89.300.000
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BKAD	6 Dokumen	382.160.000	APBD	6 Dokumen	473.200.000
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD	44 Dokumen	110.175.000	APBD	44 Dokumen	120.300.000
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	BKAD	2 Laporan	51.700.000	APBD	2 Laporan	81.100.000
					217.347.546.885			254.124.560.078

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Renja Tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan perkiraan maju renja tahun 2021 , sehingga Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 .

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2024 , dimana Renja Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah, seluruh aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2024 .
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah.
5. Renja Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan Renja yang telah diuraikan diatas maka ada catatan penting yang perlu diperhatikan.

- Bahwa pelaksanaan dari Penyusunan Renja Tahun 2024 BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat telah berpedoman pada perkiraan maju renja tahun 2025.
- Optimalisasi kinerja semua bidang (pegawai) merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan dalam tupoksi di BKAD.
- Rencana tindak lanjut dari program BKAD tetap mengedepankan bekerja dengan baik dengan menerapkan prinsip transparan dan akuntabel.